



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
SULAWESI TENGAH

E-BULETIN

KANWIL KEMENKUM SULTENG SEMESTER I TAHUN 2025





Resmi Dilantik!

4 Notaris Baru Siap Jadi Garda Depan Kepastian Hukum

09 January 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, resmi melantik empat notaris baru dan notaris pengganti di wilayah kerja Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya peran notaris sebagai garda depan dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Ia berharap para notaris dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Notaris adalah penghubung antara masyarakat dan sistem hukum. Pelayanan yang berkualitas akan mencerminkan kepercayaan publik terhadap profesi ini,” tegasnya.

Adapun notaris yang dilantik yakni Widya Aristy (Kab. Banggai), Jimmy (Kota Palu), Ayustina (notaris pengganti Kab. Morowali Utara), dan Fima Agustina (notaris pindahan dari Kab. Bandung ke Kota Palu).

Acara pelantikan turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pimpinan Kanwil, dan Majelis Pengawas Notaris Sulteng.





Kakanwil Kemenkum dan Kepala BI Sulteng Sepakat Kolaborasi Sukseskan Program Desa Sadar Hukum

14 January 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan, menyepakati kolaborasi untuk mendukung program Desa Sadar Hukum dan penguatan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Rakhmat menegaskan pentingnya kesadaran hukum sebagai fondasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sementara Rony menambahkan bahwa perlindungan hukum atas karya masyarakat menjadi kunci dalam menguatkan sektor ekonomi tersebut.

Sebagai langkah awal, keduanya akan meluncurkan podcast bersama yang menyajikan edukasi hukum dan informasi kekayaan intelektual secara mudah dan inklusif bagi masyarakat Sulteng.





Perkuat Layanan AHU, Kanwil Kemenkum Sulteng Koordinasi dengan Sesditjen AHU

14 January 2025



Dalam upaya memperkuat pelayanan publik di masa transisi kelembagaan, Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU), Hantor Situmorang, di Jakarta.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Divisi Yankum Nur Ainun, menyampaikan sejumlah isu strategis seperti peningkatan PNBPA AHU, penguatan layanan hingga ke daerah terpencil, serta pembinaan notaris.

Rakhmat menekankan pentingnya menghadirkan layanan hukum yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mengingat luasnya wilayah dan dinamika masyarakat Sulteng. Sesditjen AHU merespons dengan mendorong optimalisasi sosialisasi berbasis teknologi dan media sosial serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Kadiv Yankum, Nur Ainun, juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama dalam menyukseskan pelayanan hukum di wilayah.

Langkah ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menghadirkan pelayanan AHU yang profesional, adaptif, dan inklusif.





Kanwil Kemenkum Sulteng dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Anggaran

17 January 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Kepala BPKP Sulawesi Tengah, Eddy Suharto, dalam rangka memperkuat kerja sama pengawasan dan pengelolaan anggaran negara.

Pertemuan ini membahas peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelaksanaan program pemerintah, termasuk penguatan pengawasan terhadap proyek dan anggaran di lingkungan Kemenkum Sulteng.

Rakhmat menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung program prioritas nasional dan zona integritas. Sementara itu, Eddy Suharto menyatakan kesiapan BPKP mendampingi Kemenkum dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang lebih efektif.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan publik yang bersih dan berdampak di Sulawesi Tengah.





Kakanwil Kemenkum Sulteng Hadiri HUT ke-4 Tribun Palu

18 January 2025



© Copyright Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-4 Tribun Palu yang berlangsung meriah di Café Mutiara Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Acara ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Forkopimda, dan pimpinan Tribun Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Tribun Palu dalam menghadirkan informasi yang edukatif dan membangun. Rakhmat Renaldy juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan dan kesadaran hukum masyarakat.

“Selamat ulang tahun yang ke-4 untuk Tribun Palu. Kami dari Kemenkum Sulawesi Tengah sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Media seperti Tribun Palu memiliki peran yang sangat vital dalam menyebarkan informasi, serta mendukung pembangunan dan kesadaran hukum di masyarakat,” ungkap Rakhmat Renaldy.

Rakhmat Renaldy, Kakanwil Kemenkum Sulteng, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas jalinan kerjasama yang telah terbangun antara Kemenkum Sulteng dan Tribun Palu selama ini.

“Kami berharap sinergi antara Kemenkum Sulteng dan Tribun Palu terus terjaga untuk menciptakan masyarakat yang berwawasan hukum dan terinformasi,” ujar Rakhmat Renaldy.

Acara dimeriahkan dengan penampilan tari modern dari komunitas Tribun Palu dan ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas eksistensi media ini selama empat tahun.





Optimis Tingkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

21 January 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum mengambil langkah strategis dalam mewujudkan program kerja pada tahun 2025 dengan melaksanakan rapat akselerasi pembentukan tim kerja guna meningkatkan kinerja dan percepatan pelaksanaan program Kekayaan Intelektual.

Beberapa program kerja pun telah direncanakan, termasuk peningkatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ia juga memastikan akan turut berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan kekayaan Intelektual.

Nur Ainun menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan dan program kerja akan tercapai dengan hasil yang maksimal jika ada perencanaan yang matang, penanggung jawab dalam setiap kegiatan serta kolaborasi tim yang baik.

Program unggulan ;

- Jelajah Kekayaan Intelektual,
- Mobile Intellectual Property Clinis,
- Pendampingan Indikasi Geografis dari DJKI.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy mengingatkan betapa penting peningkatan kinerja untuk mencapai prestasi kerja pada Kementerian Hukum. Capaian kinerja yang optimal tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan visi kementerian secara keseluruhan.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi, diharapkan rapat ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mempercepat implementasi program kerja di bidang kekayaan intelektual, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tandas Rakhmat Renaldy.





Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dengan Tabur Bunga di TMP Tatura Palu

23 January 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) refleksikan peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang jatuh pada tanggal 26 Januari 2025 dengan turut serta dalam upacara penghormatan dan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, serta turut dihadiri para pejabat manajerial dan non manajerial dilingkungan Ditjen Imigrasi, Pemasarakatan serta Kanwil Kemenkum Sulteng.

Untuk Kanwil Kemenkum Sulteng sendiri diwakili oleh Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian bersama Kadiv Pelayanan Hukum, Nur Ainun.

Meskipun telah bermekar dan berada didalam satu naungan Kementerian Koordinator Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasarakatan, upacara ini menjadi wujud penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, sejalan dengan usia Imigrasi Indonesia yang telah berdiri selama 75 Tahun.

"Tidak hanya bagi jajaran Imigrasi, prosesi khidmat ini juga menjadi sejarah bagi kita semua, Insan Pengayoman," jelas Sopian.

Sementara itu, dalam keterangannya, Rakhmat Renaldy, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhakti Imigrasi tidak hanya menjadi momentum untuk merefleksikan sejarah dan perjalanan institusi Imigrasi selama 75 tahun, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului.

Hari Bhakti Imigrasi ke-75 yang mengusung tema "Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045" menjadi momentum bagi jajaran Kemenkum Sulteng, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan serta HAM untuk merefleksikan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan peringatan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh insan Kemenkum, Ditjen Imigrasi dan Pemasarakatan Sulteng untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya di bidang hukum dan keimigrasian.





Seleksi PKN I! Tingkatkan Kompetensi, Fokus Hadirkan Layanan Berkualitas

21 January 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengikuti seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) di ASN Corporate University, Jakarta.

Seleksi berlangsung selama dua hari dan diikuti peserta dari berbagai kementerian/lembaga. Rangkaian seleksi meliputi tes substansi pelatihan, bahasa Inggris berbasis CAT, psikotest, dan wawancara.

Rakhmat Renaldy menjadi salah satu dari tujuh perwakilan Kemenkum yang mengikuti seleksi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan publik yang berdampak.

"Pelatihan ini sangat penting untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Saya berharap dapat memperoleh wawasan baru yang bisa diterapkan di Kemenkum Sulteng serta berkontribusi lebih besar bagi pengembangan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Rakhmat Renaldy.





Kemenkum Sulteng Siap Hadapi Tantangan Baru: 8 Pejabat Non-Manajerial Dilantik

23 January 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah resmi melantik delapan pejabat non-manajerial baru dalam upaya untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja. Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Garuda Kemenkum Sulteng dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Kamis, (23/1/2025) siang.

“Dengan adanya pelantikan ini, kita berharap dapat memberikan angin segar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Kemenkum Sulteng. Setiap pejabat yang dilantik harus siap menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan,” ujarnya.



Pejabat Non-Manajerial yang dilantik, diantaranya:

1. Muhammad Said, sebagai Analis Anggaran Ahli Madya,
2. Abraham Hariyanto, sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda,
3. Dyah Ayu Puspitasari, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda,
4. Verra Veronika, sebagai Perencana Ahli Muda,
5. Asman, sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda,
6. Indra Ds. Gommo, sebagai Analis Hukum Ahli Muda,
7. Fitriana Anas, sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, dan
8. I Nyoman Sukamayasa, sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.





Penandatanganan Komitmen Bersama, Wujud Nyata Pembangunan Zona Integritas

24 January 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar acara penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Rakhmat Renaldy mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga semangat dan komitmen dalam beberapa hal, di antaranya:

- Memegang Teguh Nilai Integritas – Menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan – Memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi – Secara konsisten melakukan evaluasi untuk memastikan target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tercapai dengan baik.
- Berinovasi dalam Bekerja – Menghadirkan solusi yang efektif dan efisien, seiring dengan tuntutan era digital yang berkembang.





SINERGI TIGA KEMENTERIAN: PENGGUNAAN BERSAMA ASET BMN

03 FEBRUARY 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melaksanakan penandatanganan berita acara penggunaan bersama dan sementara Barang Milik Negara (BMN) bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan Sulteng.

Kegiatan ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Kanwil Imigrasi, Arief Hazairin Satoto, dan Kepala Kanwil Pemasarakatan, Bagus Kurniawan, sebagai bentuk sinergi antar tiga kementerian dalam masa transisi kelembagaan.

"langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset serta mendukung pelayanan publik yang lebih optimal di tengah perubahan struktural," ujar Rakhmat Renaldy



"Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan berbagai program dan kegiatan dapat berjalan lebih lancar dan efektif," tandas Rakhmat Renaldy.





KEMENKUM SULTENG DAN PENGADILAN TINGGI SATUKAN LANGKAH, SINERGI HUKUM MAKIN KUAT

04 FEBRUARY 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat kerja sama lintas lembaga. Kali ini, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Audiensi yang berlangsung di kantor Pengadilan Tinggi tersebut diterima langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Sulteng, Nirwana, dan membahas peningkatan kolaborasi dalam pelayanan hukum dan penegakan keadilan di wilayah Sulawesi Tengah.

Turut mendampingi Rakhmat Renaldy dalam audiensi ini, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, Kepala Divisi P3H, Sopian, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali.

“Kami berharap dengan audiensi ini, sinergitas antara Kemenkum dan Pengadilan Tinggi Sulteng akan semakin erat,” ujar Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mendukung proses penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.



KEMENKUM SULTENG IKUTI REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BMN 2024

04 FEBRUARY 2025



Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 yang dibuka secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afianta.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan integrasi data keuangan dan aset, dalam rangka mendukung proses transisi pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Sekjen menekankan pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan komitmen jajarannya untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan profesional. Ia menegaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan dan BMN di wilayah harus tetap terjaga di tengah perubahan kelembagaan.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh pengelola keuangan dan BMN dari seluruh unit wilayah. Melalui rekonsiliasi ini, Kemenkum mendorong terciptanya pelaporan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola kementerian yang mandiri.



PERKUAT SINERGI LEMBAGA HUKUM, KAKANWIL KEMENKUM SULTENG AUDIENSI DENGAN KAJATI

04 FEBRUARY 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama jajaran, melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Bambang Hariyanto, untuk mempererat sinergi antar lembaga penegak hukum.

Audiensi membahas penguatan kerja sama dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, koordinasi pelayanan publik, serta memperkenalkan Rakhmat Renaldy sebagai pimpinan baru Kanwil Kemenkum Sulteng.

“Sinergi antara Kemenkum dan Kejaksaan sangat penting, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan hukum.” ujar Rakhmat.

Rakhmat menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi demi menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajati menyambut baik inisiatif ini dan berharap kerja sama semakin erat demi keadilan yang merata di Sulawesi Tengah.





PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025: KEMENKUM SULTENG AJAK KEPALA DESA/LURAH BERPARTISIPASI

06 FEBRUARY 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menggelar sosialisasi ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2025 kepada para Kepala Desa dan Lurah se-Sulawesi Tengah melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala BPHN tentang penyelenggaraan PJA 2025.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, didampingi oleh Kadiv Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kadiv Pelayanan Hukum, Nur Ainun. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi, bagian hukum kabupaten/kota, serta ratusan Kepala Desa dan Lurah.

Dalam sambutannya, Kakanwil Rakhmat Renaldy menegaskan pentingnya peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai di tengah masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam ajang ini. Ia juga memastikan bahwa pembinaan dan pendampingan teknis akan terus dilakukan oleh Kanwil, mulai dari pengisian formulir hingga penyusunan portofolio peserta.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta, yang aktif menyampaikan pertanyaan terkait proses dan tahapan seleksi. Kemenkum Sulteng berharap kegiatan ini dapat mendorong semakin banyak Kepala Desa/Lurah mengikuti PJA 2025, sekaligus memperkuat budaya hukum dan penyelesaian damai di tingkat lokal.





MENTERI HUKUM SAMBANGI KBRI SEOUL

06 FEBRUARY 2025



Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama tim delegasi pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan (Korsel). Dalam kesempatan ini, Supratman dan tim delegasi menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri sangat penting.

"Ada banyak WNI yang tinggal di Korea, khususnya di Seoul. Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," ujar Supratman



"Atase hukum memastikan perlindungan hukum bagi WNI. Kemudian memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh," tambahnya.



PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025: KEMENKUM SULTENG AJAK KEPALA DESA/LURAH BERPARTISIPASI

06 FEBRUARY 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menghadiri kegiatan Tax Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Palu di Aula KPP Pratama Palu.

Kepala KPP Pratama Palu, Mulyana, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi penguatan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan kesadaran pajak, terutama melalui aspek legalitas badan usaha, kepatuhan administrasi, dan perlindungan kekayaan intelektual yang menjadi bagian dari sistem perpajakan nasional.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk taat pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional dan bagian dari kewajiban hukum.

Tax Gathering ini juga diisi dengan diskusi kebijakan perpajakan terkini dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak strategis. Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.



PALU SADAR HUKUM! KEMENKUM SULTENG DAN PEMKOT SIAP “GAS POL”

06 FEBRUARY 2025



Kolaborasi antara Kemenkum Sulteng dan Pemerintah Kota Palu ini berfokus pada penguatan berbagai layanan hukum, termasuk Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta pembinaan hukum daerah yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat Palu, agar mereka memahami hak dan kewajibannya, serta mendapatkan akses luas terhadap layanan hukum.

Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa tujuan ini bukan hanya tentang regulasi, melainkan juga menciptakan lingkungan yang tertib, adil, dan sejahtera. Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak akan menyelenggarakan program edukasi hukum, konsultasi gratis, pendampingan hukum bagi UMKM dan kelompok rentan, serta menyempurnakan regulasi daerah. Melalui sinergi ini, diharapkan Palu dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun budaya hukum yang progresif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.





LAYANAN HUKUM BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT SULTENG!

10 FEBRUARY 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, membahas penguatan sinergi dalam peningkatan layanan hukum di Sulawesi Tengah.

Fokus kerja sama mencakup layanan Kekayaan Intelektual (KI), administrasi hukum umum, penguatan produk hukum daerah, serta penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa/lurah.

Rakhmat menekankan pentingnya memperluas akses layanan hukum, termasuk perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat, serta kemudahan layanan notaris, badan hukum, dan apostille. Gubernur Rusdy Mastura menyambut baik sinergi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya Kemenkum memperkuat fondasi regulasi yang berkualitas dan pro-rakyat.

Kedua pihak juga sepakat mempercepat sosialisasi layanan KI, memperluas akses pelayanan administrasi hukum, serta mendorong partisipasi aktif pemerintah desa/kelurahan dalam Paralegal Justice Award sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka menjaga ketertiban hukum.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama menghadirkan layanan hukum yang adil, inklusif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Tengah.





KAKANWIL KEMENKUM SULTENG DAN REKTOR UNISMUH PALU BAHAS PENGUATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

10 FEBRUARY 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan kampus.

Pertemuan ini membahas penguatan Sentra KI, rencana kuliah umum tentang perlindungan dan pemanfaatan KI, serta pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi dosen dan mahasiswa.

Dalam audiensi ini, Rakhmat Renaldy didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Aida Julpha Tangkere. Kehadiran jajaran ini menunjukkan komitmen Kemenkum Sulteng dalam mendukung perguruan tinggi untuk lebih aktif dalam perlindungan KI.

Rakhmat menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi, dan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Sementara itu, Rektor Unismuh Palu menyatakan dukungannya terhadap kerja sama ini demi meningkatkan daya saing kampus dan kontribusi inovatif akademisi.

Kedua pihak sepakat merancang program kerja sama seperti lokakarya, bimtek, dan fasilitasi pendaftaran KI, sebagai langkah konkret mendukung ekosistem KI di Sulawesi Tengah.





TEMUI DIASPORA DI INGGRIS, MENKUM AJAK DIASPORA BERKONTRIBUSI BAGI INDONESIA

10 FEBRUARY 2025



Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bertemu diaspora Indonesia di Inggris untuk mendorong kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Menkum memaparkan rencana kebijakan kewarganegaraan yang akan mempermudah keterlibatan diaspora melalui skema mirip Overseas Citizenship of India (OCI).

Mekanisme ini diharapkan memberi kemudahan visa, akses kerja, investasi, serta kepemilikan properti di Indonesia. Pemerintah juga berencana menyederhanakan persyaratan kerja bagi diaspora, serta mengintegrasikan sistem informasi antar kementerian guna mempercepat layanan.

Selain itu, Kemenkum bersama Kemlu terus memperkuat perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri melalui integrasi data dan pendampingan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung keterlibatan diaspora, terutama dalam investasi dan pengembangan SDM lokal.



KAKANWIL KEMENKUM SULTENG DUKUNG HIPMI: PENGUSAHA MUDA PENENTU MASA DEPAN EKONOMI DAERAH

13 FEBRUARY 2025



Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menghadiri pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sulawesi Tengah masa bakti 2025–2028 di Hotel Best Western Coco Palu. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Ketua Umum HIPMI Indonesia Akbar Himawan Buchari, serta unsur Forkopimda dan perwakilan HIPMI dari seluruh Indonesia.

Pelantikan ditandai dengan serah terima jabatan dari Ketua BPD sebelumnya, Nadir Badjammal, kepada Ketua terpilih, Muhammad Fahkri Fadhturahman, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sulteng.

Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan komitmen Kemenkum Sulteng untuk terus mendukung dunia usaha muda melalui fasilitasi hukum dan regulasi yang kondusif.

“HIPMI memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui semangat wirausaha muda. Kami siap mendampingi dari sisi hukum agar iklim usaha makin sehat dan progresif,” tegas Rakhmat.

Ketua BPD HIPMI Sulteng yang baru menyatakan tekad untuk memperkuat ekosistem wirausaha muda dan menjalin sinergi lintas sektor demi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi HIPMI Sulteng dalam menatap masa depan dengan semangat kolaboratif dan inovatif.



KEMENKUM SULTENG JALIN SINERGI DENGAN BSK HUKUM UNTUK PERKUAT LAYANAN HUKUM PEMDA

18 FEBRUARY 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kadiv P3H, Sopian, dan Kadiv Yankum, Nur Ainun, melakukan koordinasi dengan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, guna memperkuat layanan hukum kepada pemerintah daerah.

Pertemuan ini membahas peningkatan layanan pembentukan Perda, khususnya dalam kondisi efisiensi anggaran. Rakhmat menekankan pentingnya dukungan Kemenkum agar regulasi daerah tetap berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pemerintah daerah di Sulawesi Tengah tetap bisa menghasilkan regulasi yang responsif, meski menghadapi keterbatasan anggaran. Layanan hukum harus hadir sebagai solusi, bukan hambatan,” ujar Rakhmat Renaldy.

Sopian turut menyampaikan isu kekurangan SDM Analis Hukum di daerah, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas perancangan regulasi.

Menanggapi hal itu, Dwi Harnanto menegaskan perlunya semangat ASN dalam memberikan layanan terbaik, meski dengan keterbatasan. Ia mendorong kolaborasi dan efisiensi untuk menjaga kualitas pelayanan hukum.

Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah demi layanan hukum yang optimal, efektif, dan transparan.





MENKUM SUPRATMAN: SEMAKIN MUDAH MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DENGAN E-HARMONISASI

25 FEBRUARY 2025



Kementerian Hukum meluncurkan dua inovasi penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan: layanan e-Harmonisasi dan buku tanya jawab pembentukan peraturan. Inisiatif ini diluncurkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman (25/2).

Menkum menekankan pentingnya digitalisasi dalam membangun kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas layanan hukum. Aplikasi e-Harmonisasi memungkinkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengajukan serta meninjau rancangan regulasi secara terstruktur, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan.

Buku tanya jawab hasil kolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diharapkan menjadi panduan teknis yang aplikatif bagi penyusun regulasi di seluruh Indonesia.

Inovasi ini mendukung target Indonesia untuk bergabung dengan OECD, dengan menekankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum demi menarik investasi.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen PP menandatangani kerja sama dengan KPK dan lima universitas: Universitas Khairun, UPMI Medan, Universitas Galuh, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut positif layanan ini, menyebutnya sebagai langkah nyata menuju transparansi regulasi daerah. "Kami siap mendukung optimalisasi e-Harmonisasi di Sulawesi Tengah," ujarnya.



OPTIMIS RAIH PERINGKAT WBBM

06 Maret, 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) virtual yang membahas strategi evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini diikuti oleh 33 Kanwil seluruh Indonesia.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Sophian, aktif dalam sesi diskusi. Mereka menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan penyusunan dokumen pendukung sebagai bagian dari evaluasi WBK/WBBM.

REKAP SATKER WBK/WBBM KEMENTERIAN HUKUM

No	Unit Kerja	Jumlah Satuan Kerja	Satuan Kerja WBK	Satuan Kerja WBBM	Belum Mendapatkan Predikat	Perolehan Predikat (%)
1	Unit Eselon I	7	6	1	0	100%
2	Kantor Wilayah	33	25	1	7	78%
3	Satuan Kerja BHP	5	-	-	5	0%
4	Satuan Kerja Badiklat	3	3	-	0	100%
	Jumlah	48	34	2	12	75%

Rakhmat Renaldy menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menerapkan strategi ZI secara sistematis dan terukur. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna mendukung pencapaian WBK/WBBM dan membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

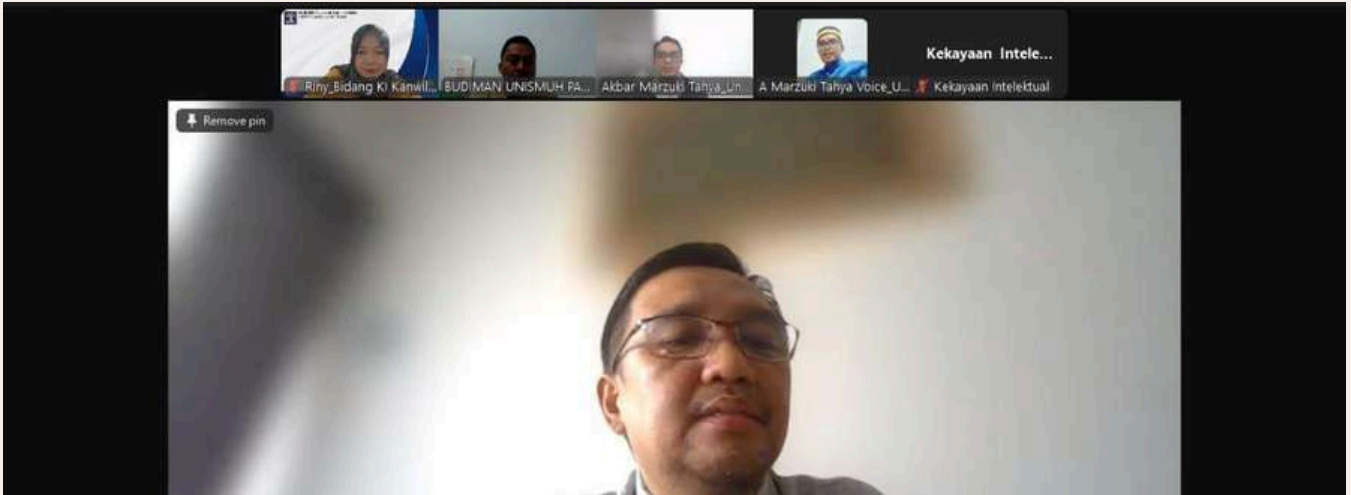
Topik yang dibahas antara lain:

- Penyusunan dokumen dan eviden digital
- Pemetaan indikator kinerja utama
- Sistem pengaduan dan inovasi layanan digital
- Transparansi dan akuntabilitas birokrasi



KEMENKUM SULTENG LAKUKAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA BAGI AKADEMISI

07 Maret, 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng melalui kerja sama dengan DJKI menggelar tindak lanjut pendampingan paten sederhana secara virtual untuk mendukung para akademisi dari Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu, dan Universitas Alkhairaat Palu.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Subdit Permohonan dan Pelayanan Paten DJKI, Rifan Fikri, dibahas tiga usulan paten sederhana yang telah diajukan sejak Oktober 2024, dengan fokus pada budidaya kepiting, pengendalian nyamuk, dan pupuk organik.

Meski sejumlah kendala ditemui dalam proses administrasi, seperti dokumen yang ditarik atau menunggu tanggapan formalitas, DJKI menegaskan komitmennya melanjutkan pendampingan secara daring. Patent One Stop Service (POSS) yang semula direncanakan di Sulawesi Tengah dibatalkan karena efisiensi anggaran.

Langkah tindak lanjut yang disepakati meliputi:

1. Revisi dokumen sesuai standar DJKI,
2. Pengajuan ulang permohonan,
3. Monitoring lanjutan oleh Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas inovasi lokal.

“Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi harus terus diperkuat demi melahirkan inovasi yang bermanfaat dan berdaya saing,” pungkasnya.

KEMENKUM SULTENG AJAK MOROWALI WUJUDKAN "DESA SADAR HUKUM"

10 Maret, 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengajak Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Desa Sadar Hukum, dalam Rapat Harmonisasi Ranperda di Aula Kebangsaan, Morowali.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Bapemperda Asgar Wahab dan Kadis Perindag H. Zainal tersebut, Rakhmat menegaskan pentingnya kesadaran hukum sebagai pondasi pembangunan daerah yang tertib dan kondusif.

Program Desa Sadar Hukum diharapkan mampu:

- Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa,
- Menumbuhkan iklim yang mendukung investasi,
- Menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah.
-

Pemkab Morowali menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini, termasuk integrasi kesadaran hukum dalam penyusunan regulasi daerah dan penguatan regulasi sektor usaha.

Kolaborasi antara Kemenkum Sulteng dan Pemkab Morowali ini diharapkan mampu menciptakan daerah yang taat hukum, aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KEMENKUM SULTENG FOKUS TINGKATKAN LAYANAN HUKUM DI WILAYAH

10 Maret, 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat upaya pembinaan hukum masyarakat melalui berbagai program strategis. Dalam rapat internal Kelompok Kerja Pembinaan Hukum yang dipimpin oleh Sopian, Kadiv PP dan Pembinaan Hukum, dievaluasi progres program hingga akhir Triwulan I 2025.

Fokus Utama:

- Pembentukan Posbakum untuk akses bantuan hukum masyarakat kurang mampu.
- Analisis & Evaluasi Perda yang mendukung program nasional "Makan Bergizi Gratis".
- Literasi Hukum & Penguatan JDIH sebagai pusat informasi hukum publik.
-

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat mewujudkan layanan hukum yang merata dan berdampak.

Kegiatan penunjang:

- Pelatihan Paralegal Serentak
- Dukungan Peacemaker Justice Award bagi kepala desa/lurah
- Inventarisasi Perda prioritas
- Optimalisasi penyebaran informasi hukum lewat JDIH

Komitmen kami: Hukum hadir di tengah masyarakat.

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2025 DITJEN AHU

11 Maret, 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti Rapat Koordinasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran TA 2025 yang digelar Ditjen AHU secara virtual. Rapat ini menindaklanjuti kebijakan efisiensi belanja negara berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan revisi DIPA Kemenkum.

Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan target IKPA meningkat dari 93,96% (2024) menjadi 96% di tahun ini.

Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Sulteng, Nur Ainun, menyampaikan bahwa realisasi anggaran masih terbatas karena proses VA baru berjalan, namun pertanggungjawaban kegiatan telah mencapai 12,8% dan ditargetkan 20% di akhir triwulan I.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan komitmen penggunaan anggaran secara optimal, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Beliau juga mendorong penguatan koordinasi dengan Ditjen AHU untuk mendukung keberhasilan program kerja.

Langkah lanjutan yang akan dilakukan Kanwil:

- Percepatan realisasi anggaran berbasis perencanaan efektif;
- Optimalisasi capaian IKPA;
- Penyesuaian revisi DIPA sesuai kebutuhan;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pelaporan.

Dengan langkah-langkah ini, Kanwil Kemenkum Sulteng siap mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan pelayanan hukum yang berkualitas di wilayah Sulawesi Tengah.

KANWIL KEMENKUM SULTENG TEMUI GUBERNUR, SINERGI UNTUK LAYANAN HUKUM BERKUALITAS

12 Maret, 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga guna meningkatkan layanan dan perlindungan hukum di daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pengenalan jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng. Rakhmat menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung program-program Pemprov di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembentukan produk hukum, hingga pembinaan desa sadar hukum.

Gubernur Anwar Hafid menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan dukungannya terhadap program-program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Keduanya sepakat pentingnya sinergi berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan daerah yang berlandaskan pada kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas peluang kolaborasi konkret, seperti penyelenggaraan penyuluhan hukum terpadu di wilayah-wilayah terpencil serta pelatihan hukum bagi aparat desa. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Pemerintah Provinsi. Dengan adanya komitmen bersama ini, berbagai program layanan hukum diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, serta mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah yang lebih tertib, inklusif, dan berkeadilan.

KEMENKUM SULTENG GELAR BUKA PUASA BERSAMA: PENGUATAN NILAI KEBERSAMAAN

13 Maret, 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar acara buka puasa bersama yang diikuti oleh jajaran Kemenkum, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan seluruh ASN Kanwil.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di lingkungan Kemenkum Sulteng. Kehadiran Ketua MUI Kota Palu dan Ketua FKUB Sulteng, Prof. Dr. H. Zainal Abidin, menambah khidmat acara dengan penyampaian tausiyah menjelang berbuka.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas Ramadan, namun menjadi pengingat akan pentingnya empati, kemanusiaan, dan kerja sama dalam tugas pelayanan publik.

Prof. Zainal dalam tausiyahnya menekankan pentingnya menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan serta menumbuhkan semangat berbagi dan toleransi antarumat. Nilai-nilai ini disebutnya sangat relevan dalam memperkuat harmoni sosial, terutama di lingkungan pemerintahan.

Saat waktu berbuka tiba, suasana kehangatan dan kekeluargaan begitu terasa. Seluruh peserta menikmati hidangan bersama, menciptakan kebersamaan yang mendalam di bulan penuh berkah ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian tidak hanya tumbuh selama Ramadan, tetapi juga menjadi nilai yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

RAKHMAT RENALDY: PELAYANAN PRIMA JADI TARGET UTAMA

20 Maret, 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, memberikan pengarahan umum kepada seluruh jajaran Kanwil dalam rangka penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiv P3H Sopian, Kadiv Pelayanan Hukum Nur Ainun, serta seluruh pejabat struktural dan ASN Kanwil. Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya koordinasi lintas divisi, pelaksanaan kebijakan secara efektif, serta profesionalisme dan integritas dalam menjalankan pelayanan publik.

Ia juga menyoroti pemanfaatan aplikasi SIMPEG sebagai alat ukur kinerja berbasis Sasaran Kerja Pegawai (SKP), guna mendorong akuntabilitas dan efisiensi kerja di lingkungan Kanwil. Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen bersama ditegaskan: akses hukum harus mudah, cepat, dan transparan.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang positif dan saling mendukung di antara seluruh pegawai. Lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif dinilai menjadi fondasi utama untuk mencapai target-target organisasi secara berkelanjutan.

Melalui pengarahan ini, semangat untuk terus memberikan pelayanan prima diteguhkan kembali, menjadikan Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai instansi yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KEMENKUM DAN KEMENHAM SULTENG SEPAKAT KELOLA ASET NEGARA BERSAMA

20 Maret, 2025



Dalam rangka mendukung transformasi kelembagaan Kemenkumham menjadi tiga kementerian baru, Kanwil Kemenkum Sulteng dan Kanwil KemenHAM Sulteng menandatangani kesepakatan penggunaan bersama dan penggunaan sementara aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai langkah strategis menjaga kelangsungan pelayanan publik.

Acara penandatanganan yang digelar di Aula Kebangsaan ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan dihadiri oleh pejabat baru Kabag Tata Usaha dan Umum, Suzana Eva Silo. Keduanya menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat dalam mengelola aset negara di tengah masa transisi kelembagaan.

Kesepakatan ini mencakup tiga aspek utama, yakni:

1. Penggunaan Bersama BMN secara efisien dan kolaboratif.
2. Penggunaan Sementara oleh KemenHAM hingga proses alih status selesai.
3. Pemeliharaan Bersama aset sesuai regulasi pemerintah.

Dengan adanya kesepakatan ini, kedua kanwil berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi kelembagaan, memastikan setiap aset digunakan secara tepat guna, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BMN.

Langkah ini diharapkan menjadi model pengelolaan aset negara yang adaptif dan kolaboratif, seiring perubahan struktur kelembagaan nasional.

BULAN PENUH BERKAH, KEMENKUM SULTENG BERBAGI KEBAHAGIAAN DI PANTI ASUHAN

21 Maret, 2025



Dalam semangat Ramadhan, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama jajaran pimpinan dan Dharma Wanita Persatuan Pengayoman, mengunjungi Panti Asuhan Raudatul Ummat sebagai wujud kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim.

Kegiatan ini menjadi momen berbagi kebahagiaan dan kasih sayang, yang diisi dengan penyerahan bantuan berupa uang tunai dan bahan makanan untuk keperluan berbuka dan sahur. Suasana penuh haru dan kehangatan menyelimuti acara saat anak-anak panti menerima bantuan dengan senyum bahagia.

Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya menjadikan Ramadhan sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat berbagi. Ia juga memberikan motivasi kepada anak-anak agar terus semangat belajar dan berani meraih cita-cita melalui pendidikan.

Aksi sosial ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang senafas dengan tugas pengayoman, sekaligus mempertegas komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian lebih di bulan suci ini.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya dilakukan saat Ramadhan, tetapi menjadi bagian dari pendekatan kemanusiaan dan penguatan peran sosial institusi hukum di tengah masyarakat Sulawesi Tengah.



MENKO YUSRIL IHZA MAHENDRA AJAK JAJARAN TINGKATKAN SINERGITAS PASCA LIBUR PANJANG

09 April 2025



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko H2IP), Yusril Ihza Mahendra, memimpin apel nasional yang dirangkaikan dengan halal bihalal pasca Idulfitri 1446 H. Kegiatan ini digelar terpusat di Jakarta dan diikuti secara virtual oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

Dalam amanatnya, Menko Yusril menegaskan pentingnya memperkuat kembali sinergi dan kekompakan antarunit kerja, serta mengajak seluruh jajaran untuk mengawali aktivitas dengan semangat baru demi pelayanan hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasarakatan yang semakin optimal.

Di Sulawesi Tengah, apel diikuti secara virtual di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng. Kepala Kantor Wilayah, Rakhmat Renaldy, menyatakan komitmen untuk terus menguatkan koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayahnya.

Apel dan halal bihalal tersebut juga dihadiri oleh pejabat struktural serta kepala kantor wilayah HAM dan Imigrasi, yaitu Mangatas Nadeak dan Arief Hazairin Satoto, sebagai simbol sinergi lintas sektor di tingkat wilayah.

Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal amanat Menko Yusril demi mewujudkan tata kelola hukum yang adil, inklusif, dan berdaya saing.





HAUL GURU TUA KE-57 JADI MAGNET, MENTERI ATR DAN WAKIL KETUA MPR TIBA DI PALU!

11 April 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut kedatangan tokoh-tokoh nasional di Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie, dalam rangka menghadiri Haul Guru Tua ke-57. Tokoh yang hadir antara lain Menteri ATR Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman, dan Staf Khusus Menkum Noor Karompot.

Haul ini merupakan agenda religius dan budaya tahunan yang menghormati perjuangan Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Guru Tua), pendiri Alkhairaat dan tokoh penting pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia.

Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa kehadiran para tokoh nasional menjadi simbol apresiasi terhadap nilai keilmuan dan perjuangan Guru Tua yang melampaui batas wilayah Sulawesi Tengah.

Ia juga menyebutkan bahwa Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dijadwalkan turut hadir. Momen ini dinilai penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah, sekaligus memperluas dampak ajaran Guru Tua bagi persatuan dan kemajuan bangsa.

Lebih dari sekadar seremoni, Haul Guru Tua menjadi refleksi kolektif bagi bangsa tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur, semangat kebangsaan, serta warisan pendidikan Islam yang inklusif dan mencerahkan.





MENKUM SUPRATMAN ANDI AGTAS TIBA DI PALU, SAMBUTAN HANGAT IRINGI KUNJUNGAN KERJA DAN HAUL GURU TUA!

11 April 2025



Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, tiba di Kota Palu dalam rangka kunjungan kerja sekaligus menghadiri Haul Guru Tua ke-57, peringatan religius dan budaya penting masyarakat Sulawesi Tengah.

Penyambutan hangat dilakukan oleh Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kakanwil Kemenham Mangatas Nadeak, Kakanwil Imigrasi Arief Hazairin Satoto, serta Asisten II Pemprov Sulteng Rudy Dewanto, yang mewakili Gubernur.

Rakhmat Renaldy menyebut kunjungan ini sebagai simbol sinergi kuat antara pusat dan daerah dalam pelayanan hukum. Rudy Dewanto menambahkan, momen ini memperkuat kerja sama lintas sektor demi kemajuan hukum dan pembangunan inklusif di Sulteng.

“Kehadiran Bapak Menteri di Kota Palu tidak hanya menjadi kehormatan bagi jajaran Kemenkum di daerah, tetapi juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami siap mendukung penuh setiap agenda beliau selama berada di Sulawesi Tengah,” ucap Rakhmat Renaldy.

Selain menghadiri haul, Menteri Hukum dijadwalkan mengikuti serangkaian agenda strategis lainnya di Sulawesi Tengah, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemantauan layanan hukum di lingkungan Kanwil.





HADIRI HAUL GURU TUA: MENKUM PASTIKAN STATUS WNI SAH, UPAYA PAHLAWAN NASIONAL TERUS BERJALAN!

12 April 2025



Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menghadiri Haul Guru Tua ke-57 di Kompleks Alkhairaat, Kota Palu, Sabtu (12/4/2025). Dalam sambutannya, Menkum menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Alkhairaat atas kontribusinya dalam pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa Guru Tua, Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, secara sah merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan dokumen resmi dari Ditjen AHU. Lebih lanjut, Menkum juga menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Presiden dan Kementerian Sosial terkait usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Di tengah isu penghinaan terhadap Guru Tua, Menkum mengajak seluruh abnau khairaat untuk menjaga ketenangan dan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, turut menyampaikan komitmennya dalam mendampingi kebutuhan hukum Alkhairaat.

Haul yang dipimpin oleh Ketua Utama Alkhairaat, Habib Alwi bin Saggaf, dihadiri oleh puluhan ribu jamaah dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pejabat negara dan kepala daerah dari kawasan timur Indonesia.





KEMENKUM SULTENG KOMITMEN WUJUDKAN LAYANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG INKLUSIF DI RKPD 2026

14 April 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan komitmen kuat untuk menghadirkan layanan dan perlindungan hukum yang inklusif saat menghadiri Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 untuk penyusunan RKPD 2026, Senin (14/4), di Kantor Bappeda Sulteng. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan dihadiri jajaran kepala daerah, pimpinan DPRD, serta kepala instansi vertikal.

Wamendagri mendorong sinergi pusat-daerah dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan penekanan Gubernur Anwar Hafid agar seluruh sektor bergerak bersama demi masyarakat dan daerah yang sama. Momentum Musrenbang menjadi ruang strategis menyatukan visi pembangunan lintas instansi.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Rakhmat Renaldy menegaskan kesiapan Kemenkum Sulteng dalam menyelaraskan program layanan hukumnya dengan prioritas pembangunan daerah. Pihaknya akan aktif memperkuat aspek kepastian hukum, edukasi masyarakat, serta pendampingan hukum bagi kelompok rentan.

Dalam penutupnya, Rakhmat menyampaikan bahwa hukum harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar aturan. Ia berharap sinergi yang terbangun dalam forum Musrenbang ini dapat menjadikan aspek hukum sebagai bagian integral dari rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2026 dan seterusnya.





KEMENKUM SULTENG 'SUNTIK' KEKUATAN HUKUM! LANTIK 24 NOTARIS DAN PPNS BARU

15 April 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng resmi melantik 24 pejabat baru, terdiri dari 19 Notaris dan 5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam acara yang digelar di Ballroom Hotel Best Western Coco, Palu.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, memimpin langsung prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa jabatan Notaris bukan hanya soal administrasi hukum, melainkan juga tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan kepastian hukum di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya PPNS sebagai penghubung pengawasan teknis dan penegakan hukum.

Sebagai bentuk inovasi layanan hukum, Kanwil Kemenkum Sulteng juga memperkenalkan aplikasi PPNS Online dari Ditjen AHU, yang mempermudah proses administrasi mulai dari pelantikan, mutasi, hingga penerbitan kartu PPNS. Aplikasi ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan berbasis PNBPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.

Dengan pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap 24 pejabat yang baru diangkat mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. “Mari kita terus bergerak maju membangun hukum yang kuat dan berkeadilan di Sulawesi Tengah,” pungkas Rakhmat Renaldy.





KADO HKI SPESIAL HUT SULTENG! KEMENKUM HADIAHKAN 50 SERTIFIKAT MEREK UNTUK UMKM!

19 April 2025



Dalam rangka memperingati HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng menyerahkan 50 sertifikat merek kepada pelaku UMKM sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, dalam gelaran “Semarak Sulteng Nambaso” di Lapangan Imanuel, Kota Palu.

Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa sertifikat ini bukan sekadar dokumen, tetapi pengakuan hukum atas hasil karya pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya perlindungan merek untuk mencegah pembajakan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Disperindag Sulteng, dengan sasaran UMKM yang belum memiliki perlindungan merek.

Wakil Gubernur Sulteng mengapresiasi kontribusi Kemenkum Sulteng dalam mendorong kesadaran hukum di kalangan UMKM. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program pemerintah provinsi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan legalitas usaha masyarakat.

Kemenkum Sulteng berharap semakin banyak pelaku usaha yang menyadari pentingnya mendaftarkan merek. Kepala Kanwil menegaskan bahwa ini baru langkah awal dan pihaknya akan terus memperluas layanan HKI hingga ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan seluruh UMKM terlindungi secara hukum.





19 PUTRA-PUTRI SULTENG BERBURU KURSI PPPK KEMENKUM! KAKANWIL JAMIN INTEGRITAS SELEKSI

22 April 2025



Sebanyak 19 putra-putri terbaik Sulawesi Tengah mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum RI. Seleksi ini berlangsung di UPT BKN Palu pada Selasa, 22 April 2025, dan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala UPT BKN Palu, Assakhiyyu.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sulteng menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan menekankan pentingnya semangat pengabdian dalam mengikuti seleksi. Ia menyebut bahwa partisipasi para peserta mencerminkan komitmen tinggi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui jalur Kementerian Hukum.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berkeadilan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang telah distandardisasi secara nasional. Proses ini dikawal ketat agar bebas dari intervensi maupun kecurangan.

Sebagai bentuk pengawasan tambahan, diterapkan teknologi face recognition untuk memastikan identitas peserta sesuai dengan data pendaftaran. Teknologi ini mampu mendeteksi dan mencegah praktik perjokian atau penyalahgunaan identitas peserta.

Seleksi PPPK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berintegritas tinggi di lingkungan Kemenkum. Diharapkan, para peserta yang lolos akan menjadi ASN yang berdedikasi, siap mengemban amanah, serta memberi kontribusi nyata bagi pelayanan publik di Sulawesi Tengah.





KEMENKUM SULTENG UPAYAKAN LINDUNGI 1.529 PRODUK UKM DI KAB. TOUNA DENGAN KEKUATAN HUKUM KI

23 April 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat kehadiran negara dalam mendampingi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mendorong perlindungan hukum melalui pendaftaran merek. Sebanyak 1.529 pelaku usaha di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menjadi sasaran program perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang digagas melalui pertemuan koordinasi antara Tim KI Kanwil dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM setempat.

Pertemuan ini menjadi titik awal langkah gerak cepat perlindungan merek yang dipimpin Kepala Bidang KI Kanwil Kemenkum Sulteng, Aida Julpha Tangkere. Ia menyampaikan bahwa potensi usaha lokal di Kabupaten Touna sangat besar dan perlu segera dilindungi melalui sistem hukum KI agar dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam pernyataannya, menekankan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menggunakan prinsip first to file. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi penting untuk menghindari sengketa, sekaligus membangun identitas dan kredibilitas usaha secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Touna sepakat menjalankan program teknis seperti pendampingan pendaftaran merek, sosialisasi, dan fasilitasi KI lainnya. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil dalam mendorong ekonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan terlindungi secara hukum.





KEMENKUM SULTENG: PENGESAHAN BADAN HUKUM PB ALKHAIRAAT LANGKAH STRATEGIS KONSOLIDASI ASET DAN UMAT

23 April 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mendukung langkah Pengurus Besar (PB) Alkhairaat dalam pengajuan pengesahan badan hukum perkumpulan. Dukungan ini diberikan melalui audiensi resmi yang berlangsung pada 23 April 2025, di Gedung Sekretariat PB Alkhairaat, sebagai respons terhadap arahan Menteri Hukum yang disampaikan dalam Haul Guru Tua ke-57.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Ili Rusliadi, memberikan penjelasan teknis mengenai tahapan pengesahan badan hukum, sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 jo. Nomor 10 Tahun 2019. Ia menegaskan pentingnya pemilihan nama perkumpulan yang sesuai syarat, serta proses yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Ketua PB Alkhairaat, Ust. Asgar Basir Khan, menyambut baik penjelasan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dalam forum internal. Hal ini dinilai strategis dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, serta mempermudah konsolidasi kelembagaan dan aset umat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa negara akan hadir mendampingi organisasi sosial-keagamaan yang ingin tertib hukum. Ia menekankan bahwa legalitas badan hukum memperkuat legitimasi organisasi, memberikan perlindungan hukum, serta membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain.





KAKANWIL KEMENKUM SULTENG: TEKNOLOGI DAN AI HARUS JADI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

05 Mei 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menekankan urgensi pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam proyek pembangunan Zona Integritas (ZI). Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng dalam apel pagi, Senin (05/05/2025), sebagai bentuk dorongan konkret untuk mempercepat reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM.

Menurutnya, teknologi dan AI kini menjadi kebutuhan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Berbagai inisiatif seperti sistem pengaduan digital, otomatisasi data, dan analisis kinerja berbasis AI dinilai mampu memperkuat sistem kerja yang efisien dan akuntabel.

Rakhmat Renaldy juga mengingatkan bahwa pembangunan ZI tidak boleh bersifat simbolik semata, melainkan harus diwujudkan dalam budaya kerja yang inovatif dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia mengajak seluruh pegawai untuk mulai merancang proyek perubahan yang sesuai dengan tantangan zaman.

Turut hadir dalam apel tersebut para pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Kanwil, serta mahasiswa dan siswa magang dari Universitas Tadulako dan SMK 1 Mepanga. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan dan kolaborasi lintas generasi dalam mewujudkan birokrasi modern.





PERSIAPAN AKTUALISASI PEACEMAKER TRAINING, FOKUS PADA PENGEMBANGAN POSBAKUM DESA

05 Mei 2025



Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Sopian, memimpin rapat penting pada Senin (5/5/2025) di ruang kerjanya untuk membahas persiapan aktualisasi Peacemaker Training tahun 2025. Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulteng dan fokus pada tindak lanjut hasil seleksi peserta yang diumumkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan sebagai pusat mediasi dan penyelesaian sengketa masyarakat. Peacemaker Training diharapkan mampu memperkuat kapasitas para pendamping hukum desa dalam membangun budaya damai melalui penyelesaian non-litigatif.

Tim pendamping yang akan diterjunkan ke desa-desa terdiri dari unsur beragam seperti Pemerintah Desa, Pengadilan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum, dan Biro Hukum. Sinergi lintas lembaga ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung suksesnya aktualisasi program yang berbasis keadilan restoratif tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa koordinasi lanjutan akan segera dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif. Ia berharap Posbakum desa benar-benar berfungsi sebagai pilar keadilan yang inklusif dan solutif di tengah masyarakat.





KEMENKUM DORONG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DUNIA USAHA MENUJU EKONOMI GLOBAL BERKELANJUTAN

06 Mei 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi dunia usaha dalam rangka mendukung terciptanya ekonomi global yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) IV APINDO Sulawesi Tengah pada Selasa, 6 Mei 2025, di Hotel Rama, Kota Palu.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah Nambaso, Berani Menuju Ekonomi Global Berkelanjutan” tersebut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya legalitas dan pendaftaran badan usaha sebagai landasan kepercayaan dalam dunia usaha. Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan administrasi hukum umum dan perlindungan kekayaan intelektual yang disediakan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Selain menyampaikan peran aktif Kemenkum dalam memberikan jaminan hukum bagi badan usaha, Rakhmat Renaldy juga mendorong para anggota APINDO untuk segera mencatatkan merek dagang, paten, dan karya intelektual mereka agar memiliki daya saing yang sah secara hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Musprov IV ini turut menjadi momentum penting bagi sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Melalui APINDO, dunia usaha didorong untuk terus berkembang dalam ekosistem yang legal, sehat, dan berorientasi pada keberlanjutan.





KOALISI KUAT DUNIA USAHA & HUKUM! KAKANWIL KEMENKUM 'SIAP SINERGI' DENGAN APINDO SULTENG!

06 Mei 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menghadiri prosesi pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sulawesi Tengah periode 2025–2030 yang berlangsung di Hotel Rama, Kota Palu. Prosesi yang berlangsung pada Selasa malam, 6 Mei 2025, ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani.

Dalam pengukuhan tersebut, Wijaya Chandra resmi menjabat sebagai Ketua DPP Apindo Sulteng. Momen ini disambut hangat oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang menyampaikan dukungan terhadap peran strategis Apindo dalam memperkuat perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Rakhmat Renaldy menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus menjalin kerja sama dengan Apindo, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan mendukung kepastian usaha. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan aman secara hukum.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru Apindo Sulteng, diharapkan akan lahir lebih banyak terobosan dalam pembangunan ekonomi daerah. Momentum ini menjadi penguat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menuju Sulawesi Tengah yang ramah investasi, kompetitif, dan berkelanjutan.





IKUTI RAKOR OPTIMALISASI, KANWIL KEMENKUM SULTENG DORONG EFEKTIFITAS LAYANAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

06 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait optimalisasi layanan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh notaris. Kegiatan yang digelar di Aula Kebangsaan tersebut dihadiri seluruh kantor wilayah se-Indonesia, Majelis Pengawas Notaris, serta pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Rakor ini menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas, ketepatan proses, dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan fidusia sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Arahan dari Dirjen AHU yang disampaikan melalui Sesditjen menegaskan bahwa penguatan sistem layanan hukum digital harus menghasilkan pendaftaran fidusia yang transparan, cepat, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Nur Ainun dan Kabid AHU Ili Rusliadi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menekankan perlunya sinergi berkelanjutan dengan notaris, organisasi notaris, dan pemangku kepentingan lain untuk menjaga kualitas serta akuntabilitas layanan pendaftaran fidusia sebagai bagian dari tanggung jawab publik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kantor wilayah diminta segera mengambil langkah-langkah konkret: memperkuat koordinasi dengan MPW, MPD, INI, serta pihak terkait lainnya; memperbaiki pelaporan pendaftaran fidusia; dan menyampaikan hasilnya ke Ditjen AHU untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Hukum. Upaya ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja layanan fidusia secara nasional dan regional.





KEMENKUM & BANGGAI 'SATU VISI' BERDAYAKAN MASYARAKAT LEWAT KEKAYAAN INTELEKTUAL & HUKUM!

07 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menerima kunjungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Banggai dalam rangka memperkuat sinergi layanan Kekayaan Intelektual (KI) serta memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Kunjungan berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025, di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.

Sekretaris Brida Banggai, Muh. Ikhsan Budiono, menyampaikan apresiasi atas cepatnya respons dan kemudahan layanan pendaftaran KI oleh Kanwil Kemenkum Sulteng. Ia juga menyampaikan kesiapan Pemkab Banggai dalam mendukung layanan ini, termasuk pembangunan gedung khusus untuk agen layanan KI dan penguatan edukasi melalui media serta lomba inovasi berbasis KI.

Menanggapi hal itu, Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut positif komitmen tersebut dan menegaskan pentingnya membangun kolaborasi berkelanjutan. Ia memaparkan rencana menghadirkan program "Guru Kekayaan Intelektual" di Banggai guna menanamkan nilai inovasi sejak usia sekolah, serta memperluas layanan hukum secara menyeluruh.

Tak hanya soal KI, Rakhmat Renaldy juga mengajak Pemkab Banggai mendukung optimalisasi Instruksi Presiden tentang koperasi merah putih. Ia menekankan pentingnya legalisasi koperasi di desa melalui pendampingan hukum dan fasilitasi notaris. Kemenkum Sulteng pun siap mengawal langkah tersebut demi menciptakan masyarakat desa yang legal dan berdaya saing.





COFFEE MORNING KEMENKUM DAN INI SULTENG: SINERGI KUAT UNTUK PERCEPATAN FIDUSIA DAN KOPERASI MERAH PUTIH

08 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan hukum. Bertempat di salah satu kafe di Kota Palu, kegiatan ini menghadirkan Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, beserta jajaran, serta Ketua INI Sulteng, Farid.

Pertemuan ini membahas dua isu utama: optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Rakhmat Renaldy menyoroti pentingnya pendaftaran fidusia secara resmi demi kepastian hukum dan perlindungan semua pihak, serta mengusulkan kebijakan batas waktu maksimal 30 hari untuk pengajuan pendaftaran sejak perjanjian pokok dibuat.

Terkait koperasi, tantangan utama di Sulawesi Tengah adalah keterbatasan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk itu, Rakhmat Renaldy mendorong kolaborasi aktif dari notaris dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, sekaligus menyampaikan rencana pembentukan forum koordinasi berkelanjutan.

Coffee Morning ini menjadi langkah konkret dalam membangun sistem layanan hukum yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen kuat antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan para notaris diharapkan menjadi fondasi bagi budaya hukum yang lebih baik di Sulawesi Tengah.





KEMENKUM SULTENG & DJKI KAMPANYEKAN ANTI PEMBAJAKAN: INDUSTRI LOKAL DI PERKUAT!

08 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengencarkan kampanye anti pembajakan melalui koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bertempat di Jakarta, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bertemu dengan Direktur Penegakan Hukum DJKI, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, guna memperkuat sinergi dalam perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan penguatan industri lokal.

Dalam pertemuan tersebut, Rakhmat Renaldy menegaskan komitmennya untuk menciptakan budaya KI yang kuat di Sulawesi Tengah melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran KI. Menurutnya, perlindungan terhadap produk lokal bukan hanya menyangkut kepastian hukum, tetapi juga menjadi kunci membangun ekonomi daerah yang inovatif dan berdaya saing.

Brigjen Arie menyambut baik langkah Kanwil Kemenkum Sulteng dan menyatakan dukungan penuh dari DJKI. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk meningkatkan kesadaran hak siar, khususnya di sektor penyiaran dan industri kreatif yang tengah berkembang di daerah-daerah.

Melalui sinergi ini, diharapkan perlindungan KI di Sulawesi Tengah semakin kuat, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar hukum dan aktif melindungi hasil karya mereka. Ekosistem KI yang sehat akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.





KAKANWIL KEMENKUM SULTENG 'KETEMU' DIREKTUR MEREK DAN IG DEMI LEGALITAS' KERANG KIMA HINGGA TENUN KELOR!

08 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperkuat komitmennya dalam perlindungan kekayaan intelektual dengan menjalin koordinasi bersama Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (IG), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI. Pertemuan yang digelar di Jakarta tersebut membahas percepatan permohonan Indikasi Geografis (IG) untuk sejumlah produk unggulan Sulawesi Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bertemu langsung dengan Direktur Merek dan IG, Hermansyah Siregar, guna mendorong percepatan perlindungan hukum terhadap produk seperti Kerang Kima Tolitoli, Beras Kambah dan Kayu Eboni dari Poso, Kopi Kopsi dari Banggai, hingga Tenun Kelor dari Kota Palu. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai identitas lokal yang perlu didukung dengan legalitas yang kuat.

Hermansyah menyatakan komitmen DJKI untuk mendukung penuh proses ini, menegaskan bahwa perlindungan IG berperan penting dalam pelestarian budaya dan peningkatan nilai ekonomi. Ia menyambut baik inisiatif dari Sulawesi Tengah dalam menggali potensi lokal melalui jalur kekayaan intelektual.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis membangun sistem kekayaan intelektual yang lebih inklusif dan merata. Dengan kolaborasi pusat dan daerah, diharapkan produk lokal Sulawesi Tengah tidak hanya dikenal secara luas, tetapi juga terlindungi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.





KEMENKUM SULTENG SAMBUT BAIK LANGKAH PENGUATAN HUKUM KAWASAN ASEAN

08 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam memperkuat kerja sama hukum regional bersama Pemerintah Malaysia. Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan mekanisme arbitrase dan mediasi komersial internasional, serta revisi regulasi penting di Indonesia.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan pijakan penting dalam menciptakan sistem hukum ASEAN yang modern, adaptif, dan berpihak pada kepastian hukum. Ia menilai bahwa prinsip-prinsip penyelesaian sengketa alternatif sangat relevan diterapkan di daerah, khususnya untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan yang kondusif.

Kanwil Kemenkum Sulteng juga menyiapkan diri menyambut ASEAN Law Forum (ALF) 2025 dengan fokus pada penguatan SDM hukum dan integrasi layanan hukum. Rakhmat Renaldy menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjadi bagian aktif dari transformasi hukum yang tengah digagas di tingkat regional.

Upaya harmonisasi hukum kawasan ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik dan perlindungan hukum warga. Selain itu, langkah Indonesia dalam mendorong Malaysia bergabung dengan Konvensi Apostille juga menjadi bagian dari strategi memperlancar legalisasi dokumen antarnegara, khususnya dalam konteks mobilitas lintas batas yang semakin tinggi.





KERJA KERAS '30 HARI' BERBUAH MANIS! MIPC KEMENKUM SULTENG CATAT ANTUSIASME TINGGI MASYARAKAT

08 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) resmi menutup rangkaian Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) 2025 yang berlangsung selama 30 hari di Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari Semarak Sulteng Nambaso 2025 dan sukses menghadirkan layanan konsultasi, edukasi, hingga pendaftaran langsung kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, menyampaikan bahwa lebih dari 10.000 masyarakat berhasil dijangkau dalam agenda promosi dan edukasi, termasuk kegiatan besar pada Hari KI Sedunia di Lapangan Immanuel Palu. Selain itu, 50 sertifikat merek diserahkan secara simbolis kepada pemerintah daerah sebagai bentuk nyata dukungan perlindungan KI.

Antusiasme masyarakat juga tercermin dari angka 102 pengunjung yang memanfaatkan layanan konsultasi, serta 18 pemohon yang langsung mengajukan pendaftaran merek. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menyediakan akses layanan hukum yang inklusif dan memberdayakan.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Sulteng mendorong kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan MIPC. Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual lokal adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem inovatif dan kreatif yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.





TARGET REFORMASI HUKUM TINGGI! KEMENKUM SULTENG AJAK PEMDA UKIR PRESTASI DI IRH 2025!

14 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar sosialisasi Pedoman dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 kepada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, Rabu (14/5/2025). Kegiatan berlangsung secara hybrid di Ruang Garuda Kanwil, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah serta pejabat struktural.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa IRH bukan sekadar angka, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam menjalankan reformasi hukum secara adil dan berkelanjutan. Sosialisasi ini, menurutnya, penting untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan peran aktif daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng juga menyerahkan penghargaan kepada daerah dengan capaian IRH terbaik tahun sebelumnya, yaitu Kota Palu di posisi pertama, disusul Morowali Utara dan Toli-Toli. Capaian Sulawesi Tengah secara umum menunjukkan peningkatan signifikan, dengan tiga daerah meraih nilai "Istimewa" pada tahun 2024.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, turut memberikan arahan virtual dari Jakarta. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan IRH. Kanwil Kemenkum Sulteng berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi menuju tata kelola hukum yang lebih baik, partisipatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.





KEMENKUM SULTENG DUKUNG PEMAJUAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT LEWAT DIALOG MOTUTURA "SULTENG NAMBASO"

15 Mei 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menunjukkan komitmen aktifnya dalam mendukung pemajuan budaya dan adat istiadat dengan berpartisipasi dalam kegiatan MOTUTURA bertajuk "Gerak Sekata Pemajuan Keragaman Budaya dan Adat Istiadat Sulteng Nambaso". Kegiatan ini digelar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah pada Kamis (15/5/2025) di Kantor BPSDM Provinsi Sulteng, dan dihadiri berbagai tokoh serta unsur lintas sektor.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, hadir sebagai perwakilan dan menerima penghargaan dari BMA atas partisipasi aktif Kanwil dalam pelestarian budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Sopian juga menyampaikan edukasi penting terkait perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), termasuk warisan budaya dan ekspresi tradisional.

Dialog Motutura ini menjadi ruang strategis menyatukan pemikiran tokoh adat, agama, dan pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya lokal. Sekretaris BMA Sulteng, Ardiansyah Lamasitudju, menegaskan pentingnya sinergi tiga pilar: pemerintah, agama, dan adat, untuk membangun daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa adat dan budaya bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari hukum yang hidup. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk memperkuat peran hukum adat dalam kerangka hukum nasional dan memperjuangkan perlindungan budaya sebagai wujud kedaulatan hukum dan sosial di Sulawesi Tengah.





KEMENKUM SULTENG DORONG PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DI TOLI-TOLI DAN PERKUAT PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

16 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan koordinasi ini digelar di Aula Kantor Bupati Toli-Toli pada Jumat (16/5/2025) sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, hadir langsung bersama jajaran, dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Moh. Asrul Bantilan, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam sambutannya, Rakhmat menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga penguatan kemandirian masyarakat melalui sistem hukum yang terstruktur.

Tak hanya itu, Kanwil juga menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para pelaku usaha di daerah. Dengan pertumbuhan jumlah pendaftaran merek di Toli-Toli dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum dan daya saing produk lokal.

Pemkab Toli-Toli menyambut baik upaya tersebut dan menyampaikan apresiasi atas komitmen Kanwil. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal serta diskusi interaktif untuk merespons tantangan dan peluang dalam pembentukan koperasi serta pengelolaan KI di daerah.





HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG MENGIKUTI RAPAT VIRTUAL RESTRUKTURISASI AKUN LAPOR! DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM RI.

20 Mei 2025



Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti rapat virtual mengenai restrukturisasi akun LAPOR! yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama Setjen Kementerian Hukum. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (20/5/2025) dan diikuti dari ruang Humas Kanwil.

Restrukturisasi ini menjadi bagian dari penyesuaian nomenklatur Kementerian Hukum seiring perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Operator LAPOR! Kanwil Kemenkum Sulteng turut mengikuti pemaparan teknis yang disampaikan oleh tim pusat terkait akun baru dan sistem integrasi LAPOR! yang lebih efisien.

LAPOR! sendiri merupakan aplikasi nasional yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap layanan publik secara daring. Dengan sistem baru ini, masyarakat dapat melihat perkembangan laporan mereka secara transparan dan dapat dipastikan setiap aduan diteruskan ke pihak yang berwenang.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa restrukturisasi ini sejalan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa LAPOR! akan menjadi kanal aspirasi nasional yang menjamin respons cepat dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah.





KANWIL KEMENKUM SULTENG HARMONISASIKAN TUJUH RANPERBUP BANGGAI LAUT

20 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyelenggarakan kegiatan harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Banggai Laut yang berlangsung pada Senin, 20 Mei 2025, di Aula Kebangsaan Kanwil. Ranperbup ini berkaitan dengan penataan wilayah administrasi serta pengelolaan dan pengalokasian dana daerah.

Kegiatan ini menindaklanjuti permohonan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretariat Daerah dan difokuskan pada materi seperti penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan, serta alokasi dana bagi desa dari hasil pajak dan cukai. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya harmonisasi dalam menjamin keselarasan setiap produk hukum dengan peraturan yang lebih tinggi dan prinsip Hak Asasi Manusia. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan proses pembahasan yang konstruktif dan teknis oleh para perancang, kegiatan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang efektif dan aplikatif. Harmonisasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat luas.



TOMBOUAT KAB.BUOL MENDUNIA: KULINER KHAS SULAWESI TENGAH RESMI JADI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL!

21 Mei 2025



Kemenkum Sulteng kembali mencatatkan salah satu kekayaan budaya daerah sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kali ini, kuliner tradisional khas Kabupaten Buol, "Tombouat", resmi diakui sebagai KIK dan penyerahan surat pencatatannya dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, kepada Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, pada Rabu, 21 Mei 2025, di ruang kerja Kakanwil.

"Tombouat" merupakan makanan khas berbahan dasar sagu yang dipadukan dengan daging ayam dan lemak kulit ayam, diproses dengan cara tradisional yang mencerminkan kekayaan kearifan lokal. Keunikan proses pembuatan serta cita rasa yang khas menjadikan kuliner ini sebagai identitas budaya masyarakat Buol yang patut dilestarikan.

Kakanwil Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa pencatatan ini adalah bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah. Dengan status hukum sebagai KIK, "Tombouat" kini memiliki perlindungan legal yang dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Wakil Bupati Buol mengapresiasi pencatatan ini dan menyebutnya sebagai tonggak penting dalam penguatan identitas daerah. Pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama lanjutan antara Kemenkum Sulteng dan Pemkab Buol, khususnya dalam penguatan sistem hukum dan layanan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.



MOMEN YANG DI TUNGGU ! KANWIL KEMENKUM SULTENG SAMBUT BERGABUNGNYA INSAN PENGAYOMAN BARU

21 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyambut kedatangan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Sarjana Tahun Anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus seleksi. Proses pelaporan diri berlangsung selama tiga hari, yakni pada 26–28 Mei 2025 di Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Jalan Dewi Sartika No. 23, Palu.

Kegiatan ini menjadi tahapan awal yang penting sebelum CPNS mengikuti orientasi dan pembekalan. Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa momentum ini menjadi awal dari perjalanan untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap memperkuat layanan publik berbasis hukum di Sulawesi Tengah.

Kanwil telah menetapkan ketentuan pelaporan, seperti penggunaan pakaian formal (kemeja putih dan celana kain hitam), serta membawa KTP dan Kartu Ujian asli. Seluruh proses akan diawasi langsung oleh jajaran Kepegawaian dan Bagian Umum guna memastikan ketertiban dan kelancaran.

Kakanwil Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa disiplin sejak hari pertama adalah pondasi penting dalam membentuk karakter ASN yang melayani sepenuh hati. Seluruh informasi resmi terkait proses ini juga akan terus disampaikan melalui kanal resmi milik Kanwil Kemenkum Sulteng.





CETAK GENERASI SADAR HKI: KEMENKUM SULTENG WUJUDKAN EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SEKOLAH POSO

21 Mei 2025



Poso, 21 Mei 2025 – Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperluas jangkauan edukasi Kekayaan Intelektual (KI) melalui program Guru Kekayaan Intelektual (RuKI). Kali ini, SMAN 2 Poso menjadi tuan rumah penyuluhan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Bidang Pelayanan KI, Aida Julpha Tangkere, dan tim operator layanan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya menanamkan pemahaman tentang perlindungan KI sejak dini kepada generasi muda. Ia menyampaikan bahwa siswa-siswi saat ini adalah pencipta masa depan yang perlu dibekali wawasan hukum terkait hasil karya dan inovasi. “Program RuKI adalah salah satu langkah strategis di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Supratman Andi Agtas untuk memperkuat budaya sadar KI di dunia pendidikan,” ujarnya.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru dan pelajar, yang mengikuti penyuluhan interaktif tentang berbagai bentuk KI, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Aida Julpha menambahkan bahwa RuKI tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi merupakan gerakan penyadaran hukum yang bertujuan membentuk pelajar kreatif yang menghargai hak atas karya sendiri maupun orang lain.

Melalui program ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap terciptanya ekosistem pendidikan yang sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah diharapkan menjadi bagian dari transformasi layanan KI yang inklusif, produktif, dan mendukung lahirnya generasi inovatif berlandaskan hukum.





RUSIA DUKUNG INDONESIA MENJADI ANGGOTA HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (HCCH)

21 Mei 2025



St. Petersburg, 21 Mei 2025 – Dalam kunjungan kerja ke Rusia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko. Pertemuan bilateral ini menghasilkan dukungan resmi dari Rusia terhadap proses keanggotaan Indonesia di Hague Conference on Private International Law (HCCH), sejalan dengan pembentukan RUU Hukum Perdata Internasional yang tengah disusun oleh Indonesia.

Kerjasama hukum antara kedua negara juga diperkuat melalui penandatanganan MoU di bidang organisasi nirlaba. MoU ini mencakup pertukaran informasi, dokumen, serta kegiatan bersama untuk memperkuat pengawasan dan pendaftaran organisasi nirlaba, termasuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menteri Supratman menyatakan kerjasama ini mendukung implementasi Stranas TPPU dan TPPT.

Selain itu, kedua negara meninjau perkembangan perjanjian bilateral yang telah ada, seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dan perjanjian ekstradisi. Meskipun perjanjian ekstradisi masih dalam proses ratifikasi, kerjasama ekstradisi tetap berjalan baik berkat hubungan diplomatik yang kuat.

Kedua menteri sepakat untuk segera menyusun work plan sebagai langkah implementatif atas dua MoU yang telah ditandatangani—yakni kerjasama di bidang hukum (Mei 2023) dan organisasi nirlaba (Mei 2025). Komitmen ini diharapkan memperkuat sinergi hukum bilateral antara Indonesia dan Rusia secara berkelanjutan.





KEMENKUM SULTENG GENCARKAN KOPERASI MERAH PUTIH: TARGET 2.017 DESA BERBADAN HUKUM!

26 Mei 2025



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih. Dalam dialog interaktif di RRI Palu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan target ambisius untuk mendorong berdirinya koperasi berbadan hukum di seluruh 2.017 desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.

Kolaborasi dengan 147 notaris se-Sulteng telah dibangun guna mempercepat proses legalisasi koperasi. Penyederhanaan persyaratan badan hukum, dari 17 menjadi hanya 5 dokumen, serta pelibatan seluruh notaris—tidak terbatas pada NPAK—merupakan langkah konkret dari Kementerian Hukum untuk memudahkan masyarakat membentuk koperasi.

Rakhmat menegaskan pentingnya dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Kemenkum Sulteng juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi, serta berkomunikasi langsung dengan Bupati dan Wali Kota se-Sulteng.

Dengan semangat kolaboratif, Kemenkum Sulteng optimistis koperasi akan tumbuh bukan hanya secara legal, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat desa. Program ini diharapkan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.





MENKUM RI DAN DUBES MESIR BAHAS KERJA SAMA APOSTILLE, HCCH, SERTA KEKAYAAN INTELEKTUAL

27 Mei 2025



Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menerima kunjungan Duta Besar Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama hukum antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam layanan apostille dan dukungan keanggotaan Indonesia dalam Hague Conference on Private International Law (HCCH). Menkum menekankan pentingnya layanan apostille untuk memudahkan pengesahan dokumen bagi WNI yang menempuh pendidikan di Mesir, dan sebaliknya.

Dalam pertemuan itu, Menkum juga menyampaikan permohonan dukungan Mesir atas upaya Indonesia menjadi anggota penuh HCCH. Indonesia saat ini telah terhubung dalam Konvensi Apostille HCCH, namun belum menjadi anggota resmi. Keanggotaan tersebut dinilai penting untuk memperluas pengakuan dokumen antarnegara secara efisien dan sah secara hukum internasional.

Selain isu apostille, Menkum menyoroti peluang kerja sama di bidang kekayaan intelektual (KI). Ia mendorong agar produk-produk unggulan Indonesia, seperti hasil pertanian dan produk indikasi geografis, dapat difasilitasi secara hukum dan perdagangan melalui perjanjian KI dengan Mesir. Kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari perayaan 80 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mesir yang akan berlangsung tahun ini.

Dubes Yasser Elshemy menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Mesir untuk memperkuat kolaborasi dengan Indonesia di berbagai bidang. Ia berharap dialog seperti ini terus berlanjut demi menjalin kerja sama konkret yang saling menguntungkan.





KEMENKUM SULTENG SAMBUT 13 CPNS BARU: ENERGI SEGAR UNTUK BIROKRASI YANG LEBIH MELAYANI

28 Mei 2025



Sebanyak 13 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi sarjana tahun 2024 resmi bergabung di Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rabu (28/5/2025). Kehadiran mereka menjadi energi baru dalam memperkuat pelayanan publik berbasis profesionalisme dan integritas di lingkungan Kemenkum.

Penyambutan berlangsung hangat di Bangsal Garuda Kanwil dan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Wahab Marawali. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya etika, kedisiplinan, dan loyalitas sebagai bekal utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas bergabungnya para CPNS sebagai bagian dari proses regenerasi birokrasi. Ia berharap wajah-wajah baru ini membawa semangat transformasi menuju layanan hukum yang makin melayani dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, para CPNS akan mengikuti rangkaian orientasi untuk memperkuat pemahaman terhadap budaya kerja, tanggung jawab, serta nilai-nilai Kementerian Hukum. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam mendorong Kanwil menuju layanan yang lebih humanis dan inovatif.





PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI, SIAP PERKUAT PELAYANAN HUKUM MASYARAKAT

02 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menyambut baik pelantikan H. Amirudin dan Furquanuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai masa jabatan 2025–2030. Pelantikan yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan sinergi antarlembaga.

Rakhmat Renaldy menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali pasangan Amirudin–Furquanuddin, serta menyatakan kesiapan Kemenkum Sulteng dalam memperkuat kerja sama, khususnya perluasan akses layanan hukum dan kesadaran hukum di wilayah Banggai.

Selama ini, Banggai menjadi salah satu mitra strategis dalam program penyuluhan hukum terpadu, fasilitasi paralegal desa, hingga pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kolaborasi ini akan diperluas dengan penguatan kapasitas aparatur desa dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan hukum yang humanis, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.





MOROWALI BERBENAH REGULASI: KEMENKUM SULTENG DORONG KEBIJAKAN BERPIHAK PADA MASYARAKAT

03 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi empat Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Morowali pada Selasa (3/6/2025). Kegiatan ini melibatkan jajaran Pemkab Morowali, perancang peraturan perundang-undangan, serta instansi pemrakarsa, dengan tujuan menyelaraskan substansi regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ranperkada yang difasilitasi mencakup isu-isu sosial seperti penanganan ODGJ, gelandangan dan pengemis, mekanisme santunan kematian, serta pelaksanaan Perda Kesejahteraan Lanjut Usia. Proses ini dilakukan secara komprehensif melalui diskusi teknis dan substansial, guna menjamin kesesuaian norma dan efektivitas implementasi di lapangan.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa fasilitasi ini merupakan bentuk layanan nyata berdasarkan amanat UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

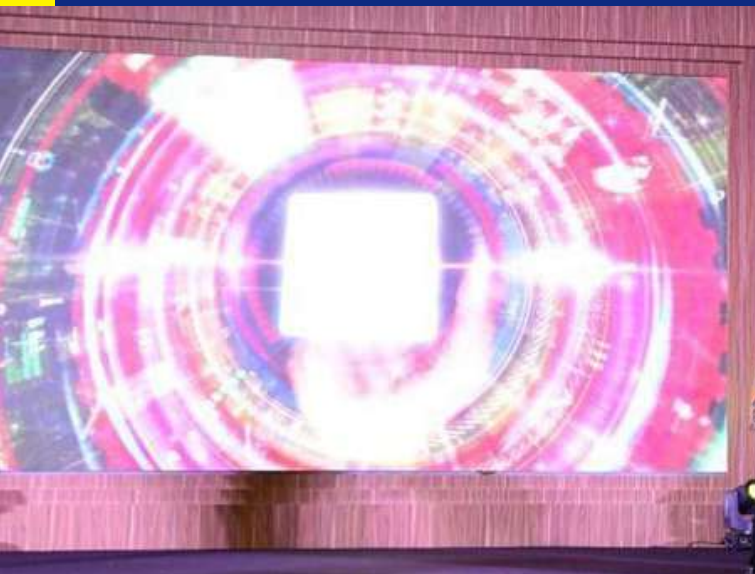
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng mendorong pembentukan regulasi yang responsif, efisien, dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Morowali.





KEMENKUM SULTENG SIAP WUJUDKAN TARGET INDONESIA NOMOR SATU ASEAN DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

04 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan komitmennya mendukung target nasional menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) terbanyak di ASEAN tahun 2025. Arahan ini disampaikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam acara Exposé Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyebut pihaknya siap mendampingi produk-produk khas daerah agar memperoleh perlindungan hukum melalui IG. Kolaborasi aktif tengah dibangun bersama BRIDA, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi serta memperkuat potensi IG seperti kopi, kakao, tenun, dan hasil bumi lainnya di Sulawesi Tengah.

Sebagai bentuk edukasi publik, Kanwil juga terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual (KI) melalui penyuluhan hukum, khususnya bagi UMKM dan komunitas budaya. Akses terhadap pembelajaran daring juga diperluas melalui laman edukasi ekii.dgip.go.id yang diluncurkan DJKI.

Rakhmat menambahkan bahwa tren permohonan KI menunjukkan pertumbuhan positif, dengan 88.893 permohonan secara nasional pada kuartal pertama 2025. "Kami optimistis Sulawesi Tengah mampu menjadi kontributor signifikan dalam pencapaian target nasional ini," tegasnya.





KEMENKUM SULTENG ANGKAT IDENTITAS LOKAL! TARGETKAN SELURUH KABUPATEN JADI KAWASAN KARYA CIPTA TAHUN 2026

05 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng memperkuat perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai strategi utama membangun ekonomi berbasis budaya. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa pihaknya akan memperluas sinergi dengan BRIDA dan pemda untuk mengidentifikasi potensi lokal seperti tenun, kuliner, hingga seni tradisional.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional DJKI yang tengah mendorong Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI). Setelah sukses menetapkan Kota Palu sebagai KBKI, Kanwil kini menargetkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dapat masuk dalam peta KBKI nasional pada 2026.

Dalam Exposé Kinerja Satu Dekade DJKI, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pusat-daerah untuk melindungi ekspresi budaya. Rangkaian kegiatan seperti lomba aransemen Mars KI bernuansa etnik dari 33 provinsi –termasuk Sulteng–menjadi bukti nyata KI mampu menjaga keberagaman dan meraih pengakuan nasional, bahkan rekor MURI.

Rakhmat menegaskan bahwa perlindungan KI bukan hanya soal hak ekonomi, tetapi juga soal menjaga identitas budaya. “Kami ingin Sulteng menjadi penentu arah kebijakan KI daerah. Semua potensi budaya lokal harus mendapat tempat dalam sistem hukum nasional,” pungkasnya.





LAWAN PERDAGANGAN ORANG: SULTENG DEKLARASIKAN PENCEGAHAN PMI ILEGAL, PERLUAS PELUANG KERJA AMAN

05 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan komitmennya dalam mendukung pencegahan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), melalui kehadiran dalam kegiatan sosialisasi peluang kerja serta penandatanganan MoU antara Menteri Ketenagakerjaan RI dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, Di Gelora Bumi Kaktus, Palu. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Deklarasi Pencegahan PMI Ilegal dan Anti TPPO.

Dalam kegiatan tersebut, penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, para bupati, dan wali kota se-Sulteng. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, hadir mewakili Kanwil Kemenkum Sulteng, bersama perwakilan instansi vertikal lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa lembaganya siap memperkuat sisi regulasi dan penyuluhan hukum untuk mendukung perlindungan pekerja migran. "Kami berkomitmen memastikan aturan hukum ditegakkan dan dipahami masyarakat agar migrasi berlangsung aman dan bermartabat," tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antarlembaga di Sulawesi Tengah untuk menciptakan peluang kerja legal dan menekan praktik TPPO di wilayah ini.





LAWAN PERDAGANGAN ORANG: SULTENG DEKLARASIKAN PENCEGAHAN PMI ILEGAL, PERLUAS PELUANG KERJA AMAN

10 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan komitmennya dalam mendukung pencegahan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), melalui kehadiran dalam kegiatan sosialisasi peluang kerja serta penandatanganan MoU antara Menteri Ketenagakerjaan RI dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, Di Gelora Bumi Kaktus, Palu. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Deklarasi Pencegahan PMI Ilegal dan Anti TPPO.

Dalam kegiatan tersebut, penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, para bupati, dan wali kota se-Sulteng. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, hadir mewakili Kanwil Kemenkum Sulteng, bersama perwakilan instansi vertikal lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa lembaganya siap memperkuat sisi regulasi dan penyuluhan hukum untuk mendukung perlindungan pekerja migran. "Kami berkomitmen memastikan aturan hukum ditegakkan dan dipahami masyarakat agar migrasi berlangsung aman dan bermartabat," tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antarlembaga di Sulawesi Tengah untuk menciptakan peluang kerja legal dan menekan praktik TPPO di wilayah ini.





KUHP BARU DAN UU PEMASYARAKATAN: PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN PSIKOLOG SIAP HADAPI PERAN STRATEGIS

12 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Kanwil Ditjenpas Sulteng menggelar sosialisasi mengenai peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan psikolog dalam paradigma hukum terbaru, yakni KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Palu, Kamis (12/6/2025), dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, serta UPT Pemasyarakatan se-Sulteng.

Dalam pemaparan materinya, Sopian menyoroti peran penting PK yang kini diperluas, tidak hanya sebagai peneliti sosial tetapi juga sebagai pendamping dan pengawas dalam sistem peradilan pidana. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan, apalagi di tengah dinamika perubahan hukum yang sedang berlangsung.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa transformasi sistem hukum melalui dua regulasi besar ini menuntut kesiapan seluruh elemen pemasyarakatan. Ia menilai PK dan psikolog memiliki posisi strategis dalam menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis, melalui peran pembinaan dan asesmen yang objektif serta komunikatif.





KANWIL KEMENKUM SULTENG TANCAP GAS: MONEV TRIWULAN II PACU REFORMASI BIROKRASI!

16 Juni 2025



Dalam upaya mempercepat implementasi reformasi birokrasi, Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Senin (16/06) secara daring. Kegiatan ini sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 dan Grand Design RB 2010–2025.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa monev bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga sarana reflektif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi. Menurutnya, Kanwil Sulteng berkomitmen penuh dalam mendorong perbaikan layanan, memperkuat akuntabilitas, serta memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih adaptif dan profesional.

Rakhmat Renaldy juga menegaskan bahwa integritas dan orientasi pada hasil nyata adalah kunci sukses reformasi birokrasi. Ia menekankan bahwa perubahan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar terekam dalam dokumen. Dengan semangat itu, Kanwil Kemenkum Sulteng siap melangkah lebih jauh menghadirkan birokrasi yang melayani dan berdampak.





KEMENKUM SULTENG DAN GARUDA INDONESIA JAJAKI KOLABORASI, PERKUAT LAYANAN PUBLIK DAN MOBILITAS KEDINASAN

17 Juni 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menerima kunjungan silaturahmi dari Branch Manager Garuda Indonesia Palu, Moh. Hafiz Arsan Haq. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas potensi kolaborasi dalam mendukung mobilitas kedinasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tengah.

Kerja sama strategis, khususnya dalam penyediaan layanan transportasi udara bagi keperluan perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan institusional.

Menanggapi hal tersebut, Rakhmat Renaldy menyambut baik inisiatif kolaboratif itu dan menilai bahwa sinergi lintas sektor, khususnya dengan BUMN seperti Garuda Indonesia, akan memperkuat ekosistem pelayanan publik yang efisien dan responsif. Ia menekankan pentingnya peran transportasi udara dalam mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Sulawesi Tengah.

Kunjungan ini menjadi awal dari komunikasi aktif yang diharapkan membuka peluang kerja sama konkret ke depan, termasuk untuk mendukung event nasional, promosi layanan hukum di wilayah terpencil, serta pelatihan pegawai. "Kami terbuka terhadap bentuk kerja sama yang sejalan dengan visi pelayanan publik yang modern, cepat, dan berdampak," pungkas Rakhmat Renaldy.





KEMENKUM SULTENG CETAK PEMIMPIN BIROKRASI UNGGUL: DUA PEJABAT TINGGI IKUTI PKN II NASIONAL

17 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng mengutus dua pejabat tingginya, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025. Pelatihan ini digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum secara nasional dan resmi dibuka pada 17 Juni 2025.

Pelatihan yang berlangsung selama 107 hari dengan metode blended e-learning terbatas ini diikuti oleh 60 peserta dari seluruh Indonesia. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, bersama Kepala LAN RI turut membuka kegiatan ini secara resmi dan menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan strategis untuk mendorong birokrasi yang modern dan responsif.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi jajarannya dalam program tersebut. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dua pejabat tersebut merupakan wujud nyata komitmen Kanwil dalam mencetak pemimpin yang adaptif, berintegritas, dan siap menjawab tantangan di bidang pelayanan hukum dan pembinaan regulasi.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy berharap agar pelatihan ini melahirkan inovasi nyata melalui proyek perubahan yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Kegiatan ini adalah momentum penting untuk mendorong lahirnya gagasan-gagasan strategis demi memperkuat pelayanan hukum di Sulawesi Tengah," pungkasnya.





KEMENKUM SULTENG TEGASKAN KOMITMEN PERCEPATAN PENDIRIAN KOPERASI MERAH PUTIH DI SIGI

17 Juni 2025



© Copyright Kantor Wilayah Kemenkum

Sigi – Dalam rangka mempercepat legalisasi Koperasi Merah Putih (KMP), Kanwil Kemenkum Sulteng menggelar monitoring langsung ke Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, pada Selasa (17/6/2025). Monitoring ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi, jajaran notaris, serta pengurus KMP Kalukubula.

Kepala Desa Kalukubula melaporkan bahwa koperasi telah terbentuk secara internal, namun proses pengesahan badan hukum masih tertunda akibat kendala dokumen. Kondisi serupa terjadi di desa-desa lain, di mana lebih dari 170 koperasi belum dapat disahkan karena belum terpenuhinya persyaratan administratif.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulteng menegaskan pentingnya sinergi dan kerja cepat dari notaris, pemerintah desa, dan pengurus koperasi. Ia juga menyoroti tenggat waktu nasional hingga 30 Juni 2025 serta kendala teknis seperti gangguan sistem AHU Online, yang diusulkan untuk segera dioptimalisasi oleh pusat.

Dengan monitoring ini, Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan legalisasi koperasi di daerah. “Kita ingin koperasi benar-benar sah secara hukum, aktif, dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tegas Rakhmat Renaldy.





KEMENKUM SULTENG DAN DINAS P2KB BAHAS ASPEK HUKUM PROGRAM MBG DI SULTENG SEBAGAI IMPLEMENTASI ASTA CITA PRESIDEN

18 Juni 2025



Dalam rangka memastikan setiap program prioritas nasional berjalan sesuai hukum, Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan koordinasi dengan Dinas P2KB Provinsi Sulteng pada Selasa (18/6). Fokus pembahasan tertuju pada aspek legalitas Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden. Hadir dalam koordinasi ini Analis Kebijakan Fitrianas dan Analis Hukum Jimmy, mewakili Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kemenkum Sulteng menggali aspek-aspek hukum seperti kewenangan daerah, kebutuhan regulasi pendukung, dan perlindungan hukum bagi sasaran program seperti ibu hamil, balita, dan pelajar. Plt Kepala Dinas P2KB, Rita Zuriati, mengapresiasi dukungan Kemenkum dan menyebut pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat regulasi serta menghindari hambatan implementatif di lapangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa keterlibatan Kemenkum adalah bentuk pengawalan terhadap prinsip hukum dalam kebijakan publik. Pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan dan analisis hukum agar program prioritas Presiden benar-benar efektif, berkeadilan, dan sesuai hukum yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, Kemenkum Sulteng menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun regulasi yang kokoh. Tujuannya tidak hanya agar program makan bergizi gratis berjalan lancar, tetapi juga berkelanjutan secara hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.





KEMENKUM SULTENG TINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI LEWAT PELATIHAN KEPROTOKOLERAN DAN AJUDAN PIMPINAN

19 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menyelenggarakan Pelatihan Keprotokoleran dan Calon Ajudan/ADC serta Staf Pribadi Pimpinan bagi CPNS dan pegawai internal. Kegiatan ini digelar di Ruang Garuda Kanwil, sebagai upaya strategis membentuk aparatur yang profesional dan siap mendampingi pimpinan secara protokoler maupun administratif.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan bahwa tugas keprotokoleran dan peran ajudan bukan sekadar administratif, tetapi berperan langsung menjaga citra dan wibawa institusi. Profesionalisme, loyalitas, serta ketanggapan menjadi pondasi penting dalam mendampingi pimpinan dan menjalankan tugas kelembagaan.

Pelatihan dibuka oleh Koptol Dade Abdullah dari Polda Sulteng yang menyoroti pentingnya pengamanan dan komunikasi terbatas dalam tugas ajudan. Materi mencakup tata tempat, susunan acara, etika protokoler, serta penyambutan tamu VIP. Sementara pelatihan ajudan difokuskan pada pengelolaan agenda pimpinan, pengamanan pribadi, dan keterampilan komunikasi strategis.

Peserta turut dilibatkan dalam simulasi acara resmi sebagai bentuk latihan praktis. Melalui pelatihan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap terbentuk barisan pegawai yang tangguh, berintegritas, dan siap mendukung tugas pimpinan dengan profesional, menjaga kerahasiaan, serta memahami nilai-nilai keprotokoleran dalam birokrasi modern.





KAKANWIL KEMENKUM SULTENG AJAK CPNS HABITUASIKAN HIDUP SEHAT DAN BANGUN RELASI LEWAT OLAHRAGA

20 Juni 2025



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, mengajak 13 CPNS formasi 2024 membiasakan hidup sehat dan membangun relasi sosial melalui kegiatan olahraga bersama di Taman GOR Kota. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk lari pagi dan latihan tenis lapangan bersama jajaran pegawai serta komunitas olahraga dari unsur perangkat daerah.

Rakhmat Renaldy menekankan bahwa olahraga bukan hanya untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, melatih kedisiplinan, serta memperkuat komunikasi sosial yang sehat dan inklusif. Ia berharap para CPNS dapat mengembangkan kebiasaan positif yang menunjang produktivitas dan kerja sama dalam pelayanan publik.

Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya unggul secara intelektual, namun juga kuat secara jasmani dan emosional. Melalui kegiatan olahraga, CPNS dilatih untuk membangun solidaritas dan jejaring lintas sektor dalam suasana yang lebih cair dan penuh semangat.

Kegiatan ini turut diikuti sejumlah pejabat struktural dan staf, serta ditutup dengan komitmen Kakanwil untuk terus menghadirkan ruang-ruang pembinaan nonformal yang membentuk karakter ASN unggul, sehat, dan adaptif. "Semoga semangat sehat dan sinergi ini menjadi identitas ASN Kemenkum Sulteng ke depan," ujar Rakhmat Renaldy.





KEMENKUM SULTENG SERAHKAN 8 SERTIFIKAT HAK CIPTA KE SMPN 1 PALU: APRESIASI KARYA INOVATIF GURU DAN SISWA

23 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng menyerahkan delapan sertifikat hak cipta kepada SMPN 1, sebagai bentuk apresiasi negara atas karya orisinal yang dihasilkan oleh guru dan siswa. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan diterima langsung oleh Kepala Sekolah, Yusri.

Delapan karya yang dicatat meliputi inovasi teknologi sederhana, pangan fungsional, pengembangan literasi, serta pelestarian kearifan lokal. Di antaranya adalah ciptaan seperti "Pintu Ruang Ganti Otomatis Berbasis Sensor PIR" dan buku inspiratif berjudul "Jual Kakimu Ayah, Aku Mau Jadi Dokter." Ciptaan ini dinilai sebagai representasi semangat kreatif lintas bidang di lingkungan sekolah.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat ini bukan sekadar proses administratif, melainkan pengakuan konkret terhadap kecerdasan dan daya cipta anak bangsa. Ia menegaskan komitmen Kanwil untuk terus mendorong kesadaran hukum dan budaya kekayaan intelektual di dunia pendidikan.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Palu, Yusri, mengungkapkan apresiasi atas dukungan dan pendampingan dari Kemenkum Sulteng. Ia menyebut pengakuan hak cipta ini sebagai langkah maju bagi sekolahnya dan motivasi untuk melahirkan lebih banyak karya inovatif.





REFORMASI HUKUM BANGGAI MONCER: KEMENKUM SULTENG KAWAL RAIH NILAI ISTIMEWA IRH 2025!

23 Juni 2025



Kanwil Kemenkum Sulteng terus menunjukkan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum, khususnya melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Tim Sekretariat IRH Kanwil yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, hadir langsung di Kabupaten Banggai untuk memastikan proses pengumpulan dan pengunggahan data dukung berjalan optimal.

Dalam kegiatan pendampingan yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Kabupaten Banggai, tercatat bahwa daerah tersebut telah mengumpulkan 85% data dukung untuk seluruh variabel IRH.

Kabupaten Banggai sebelumnya tercatat sebagai salah satu daerah dengan nilai penilaian mandiri IRH terbaik di Sulawesi Tengah untuk tahun 2023–2024. Hal ini menjadi landasan kuat untuk mendorong pencapaian nilai istimewa pada penilaian tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Kabag Hukum juga menyampaikan apresiasi atas bimbingan intensif dari Kanwil Kemenkum Sulteng. Kegiatan ini menegaskan peran strategis Kanwil, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam penguatan reformasi hukum sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan supremasi hukum.





SIGI GENAP 17 TAHUN, KEMENKUM SULTENG NYATAKAN DUKUNGAN KUAT UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS LOKAL

24 Juni 2025



Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menghadiri Upacara HUT ke-17 Kabupaten Sigi yang digelar di Kantor Bupati Sigi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari berbagai daerah, termasuk para kepala daerah dari Sulawesi Tengah dan provinsi tetangga.

Mengusung tema “Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”, momentum HUT ke-17 ini menjadi refleksi atas capaian Kabupaten Sigi dan semangat membangun daerah berbasis potensi lokal. Kegiatan turut diramaikan dengan pameran budaya dan pelayanan publik, termasuk partisipasi Kanwil Kemenkum Sulteng melalui stand layanan Kekayaan Intelektual dan AHU.

Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi atas kemajuan Sigi serta menegaskan dukungan Kemenkum terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan hukum di sektor unggulan daerah, seperti pertanian dan pariwisata.

Dalam semangat sinergi, Kemenkum Sulteng siap terus mendampingi Pemda Sigi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat serta perlindungan kekayaan intelektual berbasis lokal. Diharapkan, Sigi terus tumbuh menjadi daerah yang mandiri, inklusif, dan mampu bersaing secara regional maupun nasional.





HUT SIGI KE-17 DIMERIAHKAN PENGAKUAN KI: AYAM PANGGANG BIROMARU RESMI DILINDUNGI NEGARA!

25 Juni 2025



Dalam semarak HUT Kabupaten Sigi ke-17, kuliner khas daerah, Ayam Panggang Biromaru, resmi tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sertifikat KIK diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Nur Ainun, kepada Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, dalam upacara di Lapangan Taiganja.

Sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan dan perlindungan hukum atas kuliner legendaris Sigi yang telah menjadi identitas budaya masyarakat selama puluhan tahun. "Ini bukan hanya soal tradisi, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi lokal lewat perlindungan hukum. Ayam Panggang Biromaru kini sah milik masyarakat Sigi," ujar Nur Ainun.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap warisan budaya seperti kuliner merupakan langkah konkret menghadirkan negara dalam pembangunan berbasis kekayaan intelektual. Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti MoU antara Kemenkum dan Pemkab Sigi dalam mendorong Kawasan Berbasis KI, demi mengangkat budaya lokal sebagai kekuatan hukum dan ekonomi.





RAMPORAME FESTIVAL 2025 GAUNGKAN PENTINGNYA KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK KOMUNITAS KREATIF

27 Juni 2025



Ramporame Festival 2025 kembali digelar oleh warga Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sebagai ajang tahunan yang menjadi ruang kolaborasi komunitas kreatif lokal. Dengan tema “Ramporame Tumbu Bersama”, festival ini menghadirkan beragam karya dari seni rupa, musik, desain, hingga teknologi. Salah satu sesi istimewa menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Nur Ainun, sebagai narasumber tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI).

Dalam sesi sosialisasi, Nur Ainun menekankan bahwa karya lokal memiliki nilai ekonomi yang besar jika dilindungi secara hukum. Ia menjelaskan bahwa perlindungan KI – seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri – sangat penting untuk menjaga orisinalitas serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku kreatif.

Turut hadir tim dari Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sulteng yang memberikan panduan teknis pendaftaran KI dan menjawab berbagai pertanyaan peserta festival. Kehadiran Kemenkum Sulteng memberikan edukasi langsung tentang bagaimana komunitas dapat mengamankan hak atas karya mereka secara legal.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang memadukan seni, budaya, dan edukasi hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa Ramporame Festival menjadi bukti bahwa kreativitas lokal bisa tumbuh menjadi kekuatan sosial dan ekonomi, terlebih dengan dukungan sistem perlindungan KI yang kuat.





KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH



<https://sulteng.kemenkum.go.id/>



Kemenkumsulteng



@kemenkumsulteng



@kemenkumsulteng